



Penyusunan RKPD Harus Sesuai Dengan Rencana Penganggaran

PUTUSSIBAU-RK. Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020 tingkat Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 di ruang sidang DPRD setempat, Senin (25/3).

Musrenbang kali ini mengangkat tema "Menuju Kapuas Hulu Mandiri" dihadiri langsung Wakil Gubernur Kalbar, H. Ria Norsan beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalbar, OPD Kabupaten Kapuas Hulu, Forkopimda, pimpinan BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat serta tamu undangan lainnya.

"Tujuan yang kita capai yakni untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, sinkronasi data usulan yang dimulai dari desa, kecamatan dan OPD," kata Nasir.

Beberapa strategi dalam penyusunan RKPD diantaranya menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi. RKPD tahun anggaran 2020 menjadi dasar untuk menyusun APBD di 2020. "Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, penyusunan RKPD harus sesuai dengan rencana penganggaran 2020, dengan menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting," ujar Nasir.

Nasir menjelaskan, Musrenbang ini merupakan lanjutan dari Pra-Musrenbang forum OPD dan hasilnya sudah diinput dalam aplikasi e-planning. Ia menegaskan, setiap daerah wajib melaksanakan Musrenbang secara berjenjang, untuk menyerap aspirasi masyarakat. "Musrenbang merupakan instrumen penting untuk menghasilkan RKPD yang tidak lepas dari RPJMD

(rencana pembangunan jangka menengah daerah, Red) Kapuas Hulu 2016-2021," jelas Nasir.

Lanjutnya, Forum ini sangat penting untuk penajaman visi misi dan program pembangunan kedepan, RKPD mempunyai peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Dokumen RKPD harus memiliki kaitan dengan RPJMD untuk memastikan keberlanjutan pembangunan," ucap Nasir.

Menurut Bupati dua periode ini, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan paling fundamental. Hingga saat ini pemerintah kabupaten itu terus berupaya dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta pelayanan publik yang maksimal. "Kita juga menekankan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi daerah, yang tidak hanya terjadi pada wilayah tertentu, namun harus sampai ke pelosok dan daerah perbatasan," ujar Nasir.

Sehingga kedepan pembangunan ekonomi di daerah itu adil dan merata, memiliki pilihan dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup yang layak. Nasir juga menyampaikan bahwa pemerintah layanan pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan, kemudian infrastruktur dasar yang menjadi akses penting bagi masyarakat. "Kita harapkan strategi pembangunan Kapuas Hulu terintegrasi dengan provinsi dan pusat, maka kita perlu saran dan masukan agar penyusunan RKPD 2020 bisa mengakomodir kepentingan masyarakat," lugas Nasir.

Sementara itu, Wagub Kalbar H. Ria Norsan mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten itu karena sudah semakin baik, sehingga dalam penilaian laporan keuangan bisa meraih pre-



SAMBUTAN. Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menyampaikan sambutan pada Musrenbang penyusunan RKPD tahun anggaran 2020 tingkat Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 di ruang sidang DPRD setempat, Senin (25/3). **ANDREAS-RK**

dikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Norsan mengingatkan, dalam proses penyusunan dan penetapan RKPD tahun 2020 supaya mengikuti mekanisme dan tahapan yang telah diatur dalam undang-undangan yang berlaku. Ia berharap Musrenbang RKPD ini setiap program yang masuk bisa disepakati dan disetujui bersama seluruh pemangku kepentingan untuk pembangunan yang lebih baik. "Mari kita bekerja lebih serius dalam pencapaian target pembangunan, khususnya di tahun 2020 lakukan sinkronisasi program kegiatan," ujar Norsan.

Norsan juga berharap apa yang telah dicapai dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, kemudian melakukan koreksi, perbaikan terhadap hal-hal yang dianggap kurang tepat. "Sehingga apa yang kita targetkan dapat dicapai pada tahun 2020 mendatang," pungkasnya. (**dRe**)